

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Kelompok masyarakat nelayan adalah komunitas pesisir yang menggantungkan kehidupan mereka pada sumber daya laut, dengan profesi utama sebagai nelayan. Mayoritas penduduk Desa Weru bekerja dalam sektor perikanan sebagai nelayan. Nelayan Desa Weru dahulunya hanya memakai alat tangkap berupa jaring dan pancing, sedangkan kapal yang dipakai masih menggunakan layar tidak menggunakan mesin bermotor, namun seiring perkembangan pada zaman dan era modernisasi yang terjadi hingga saat ini, masyarakat Desa Weru yang memiliki mata pencaharaan sebagai nelayan tradisional maupun modern memiliki perspektif bahwasannya seluruh masyarakat yang lahir dan bertempat tinggal disana, nantinya akan menjadi sebuah nelayan yang akan mengarungi lautan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perspektif ini menjadi sebuah idealis bagi masyarakat setempat yang diyakini sejak zaman nenek moyang dan sudah turun temurun diwariskan terhadap masyarakat Desa Weru terkhusus bagi kepada seorang laki-laki..

Dan berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan sebelumnya:

Table 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rahayu, (2017).	Sikap Nelayan terhadap Pemberlakuan	Perubahan sikap yang dinyatakan oleh

		Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pelarangan Alat Tangkap Ikan (Studi Deskriptif di Desa Warulor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)	masyarakat nelayan akibat kebijakan yang kurang memuaskan atau cenderung lebih merugikan masyarakat dipengaruhi oleh 3 aspek yakni; Sikap <i>Kognatif</i> (pemikiran), Sikap <i>Afektif</i> (perasaan), dan Aspek <i>Konatif</i> (perilaku).
2.	Satriani, (2018)	Resistensi Sosial Masyarakat Suku Bajo : (Studi Kasus Atas Perlawanan Masyarakat Di Pulau Masudu Kecamatan Poleang Tenggara Terhadap Kebijakan Resettlement Ke Desa Liano Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana)	Resistensi sosial yang dilakukan oleh masyarakat sukuBajo terhadap kebijakan disebabkan oleh, antara lain : Faktor budaya dan ekonomi masyarakat, Faktor perubahan struktur sosial, serta Faktor Lingkungan dan Sarana. Dalam pola resistens yang dilakukan masyarakat suku Bajo tersebut dilakukan berdasarkan dengan 2 strtegi resistensi, yakni Demonstrasi yang dilakukan secara terang-terangan terhadap pemerintah terkait kebijakan resettlement yang berpengaruh pada pola kehidupan

			masyarakat serta Perlawanan Temporer yang dilakukan suku Bajo dengan menyatakan sikap apatis terhadap pihak pemerintah setempat.
3.	Hanum, (2021)	“Dampak Kebijakan Pelarangan Cantrang dan Dampaknya Terhadap Nelayan Cantrang di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan”	Fakta terhadap pelarangan alat tangkap yang digunakan oleh nelayan lokal sejak dahulu menimbulkan resistensi dari nelayan. Kebijakan dianggap bermasalah karena merugikan nelayan serta proses sosialisasinya yang sangat minimum. Konflik selanjutnya terjadi karena ketidakpuasan nelayan diartikulasikan dalam bentuk konfrontasi secara langsung.
4.	Sambah, (2022)	Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Dan Pemberdayaan Nelayan Kecil Di Wilayah Kabupaten Lamongan	Berdasarkan hasil penelitian bahwa Implementasi Kebijakan Larangan Alat Tangkap Cantrang ataupun cantrang di Desa Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan mengalami kegagalan dan menimbulkan penolakan

			<p>dari masyarakat di karenakan kebijakan tersebut dinilai masih belum adanya solusi yang pasti hingga sampai saat ini. Terlebih lagi, kebijakan tersebut justru mengakibatkan masyarakat nelayan semakin sengsara dikarenakan alat tangkap pengganti yang tidak sesuai dengan Sumberdaya yang di pakai.</p>
5.	Prakosa, (2017)	<p>Analisis Teknis Dan Finansial Usaha Perikanan Tangkap Cantrang di Pelabuhan Perikanan Pantai (Ppp) Wonokerto Kabupaten Pekalongan</p>	<p>Tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap di pantura Jawa Tengah terindikasi telah mengalami <i>overfishing</i>. Oleh karena itu, pengelolaan sumberdaya ikan pesisir di pantura Jawa Tengah perlu penanganan khusus agar pemanfaatan sumberdaya ikan bersifat ramah lingkungan dan menjaga kelestarian sumberdaya ikan. Kondisi sumberdaya perikanan tangkap di pantura Jawa Tengah</p>

			<p>khususnya kabupaten pekalongan yang overfishing tersebut perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Kalau tingkat penangkapan tidak dikontrol dengan optimal, maka pemanfaatan sumberdaya ikan di pantura Jawa Tengah akan tidak efisien, dan mengganggu kelestarian sumberdaya ikan.</p>
6.	(Triadiyatma, 2019)	<p>Model Penyelesaian Konflik Nelayan Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Modal Sosial Di Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan</p>	<p>Pemecahan konflik dalam upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah adalah melalui mediasi dengan bentuk penyuluhan dan sosialisasi, serta melibatkan tokoh masyarakat nelayan dan tokoh agama yang berkolaborasi untuk mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik dalam pencarian solusi konflik. Selain itu, konflik yang terjadi juga dapat diselesaikan melalui cara yang arif, yaitu musyawarah atau</p>

			kompromi, dengan cara saling mengganti rugi antar pihak yang berkonflik bila ada yang merasa dirugikan.
--	--	--	---

2.2. Alat Tangkap Cantrang

Cantrang merupakan salah satu alat penangkap ikan yang telah dikenal sejak lama oleh nelayan di Indonesia. Cara kerjanya melibatkan penggunaan kedua sayap jaring untuk mengejutkan dan menggiring ikan agar masuk ke dalam kantong jaring, yang kemudian ditarik menuju kapal setelah mengelilingi kawanan ikan. Meskipun telah digunakan sejak dahulu, cantrang masih dikategorikan sebagai alat tangkap tradisional karena pengoperasiannya bersifat manual dan belum menggunakan teknologi atau alat bantu mekanis. Selain itu, pengoperasian alat tangkap cantrang dilakukan pada daerah penangkapan di sekitar pantai sehingga produktivitas penangkapannya masih tergolong rendah (Nur, 2021).

Alat tangkap *cantrang* memiliki kantong yang terbuat dari bahan waring, yang sayangnya tidak memungkinkan ikan kecil muda untuk tumbuh dan berkembang hingga mencapai nilai ekonomi yang lebih tinggi atau memiliki kesempatan bereproduksi sebelum tertangkap. Meskipun demikian, cantrang tetap dianggap sebagai salah satu alat penangkapan yang cukup produktif dalam memanfaatkan sumber daya perikanan laut. Jenis ikan yang menjadi tujuan penangkapan dengan cantrang adalah ikan yang hidup bergerombol pada lapisan permukaan perairan, baik yang bergerombol dalam jenis yang sama ataupun dalam

jenis yang berbeda (Sambah et al., 2022). Hasil tangkapan yang terutama jenis-jenis ikan pelagis kecil seperti ikan layang, selar, tongkol, kembung, tembang.

2.3. Pelarangan Alat Tangkap Cantrang

Kegiatan penangkapan ikan tidak terlepas dari dua aspek utama, yaitu teknis dan biologis, yang keduanya harus dikombinasikan guna mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Aspek teknis mencakup pemahaman terhadap teknologi penangkapan ikan yang efisien untuk mendukung pengembangan usaha perikanan, sementara aspek biologis berkaitan dengan ukuran ikan hasil tangkapan yang mencerminkan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan. Informasi ini penting sebagai dasar dalam perumusan strategi pengelolaan perikanan berkelanjutan. Penerapan konsep perikanan berkelanjutan sendiri dilatarbelakangi oleh kekhawatiran akan penurunan kemampuan ekosistem perairan dalam mempertahankan ketersediaan sumber daya ikan. Gagasan utama dari perikanan berkelanjutan adalah melakukan penangkapan secara bertanggung jawab agar populasi dan hasil produksi ikan tetap stabil dari waktu ke waktu, mengingat ikan merupakan sumber daya yang dapat diperbarui. Namun, penerapan kebijakan baru dalam rangka keberlanjutan ini menimbulkan berbagai tanggapan, termasuk pro dan kontra, terutama dari nelayan di Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.

Perhatian Pemerintah Indonesia terhadap pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan terus ditingkatkan. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik

Indonesia. Hal ini menyebabkan gejolak vertical antara masyarakat dengan pemerintah dikarenakan regulasi yang menyebutkan pelarangan alat tangkap cantrang yang dikategorikan dalam pukat tarik sesuai dengan pasal 2 ayat 5 yang menyebutkan bahwa terkait pelarangan alat tangkap cantrang yang mengakibatkan menurunnya sumberdaya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumberdaya ikan (Sambah et al., 2022).

2.4. Definisi dan Konsep Resistensi Nelayan Desa Weru

Resistensi dan konflik adalah aspek instrinsik dan tidak mungkin dihindarkan dalam perubahan sosial. Konflik adalah sebuah ekspresi heterogenitas, kepentingan, nilai, dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial. Masyarakat selalu mengalami perubahan sosial baik pada nilai dan strukturnya secara revolusioner maupun evolusioner. Perubahan-perubahan dipengaruhi oleh gerakan-gerakan sosial dari individu dan kelompok sosial yang menjadi bagian masyarakat. Scott dalam bukunya *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*, menamai bentuk perlawanan ini sebagai perlawanan primitif. Bentuk-bentuk perlawanan demikian merupakan strategi sehari-hari yang dilakukan terus-menerus dan permanen dari kelas-kelas bawah yang selalu kalah. Perlawanan yang khas dari orang-orang kalah ini akan sulit dihilangkan selama kondisi struktur sosial masih eksploitatif dan tidak adil (J. C. Scott, 2016).

Pola dan konsep resistensi yang diungkapkan James Scott mendefinisikan bahwa perlawanan sebagai segala tindakan yang dilakukan oleh kaum atau kelompok subordinant yang ditujukan untuk mengurangi atau menolak klaim (misalnya harga sewa atau pajak) yang dibuat oleh pihak atau kelompok

superdinant terhadap mereka. Scott membagi perlawanan tersebut menjadi dua bagian, yaitu:

1. Resistensi terbuka (*Public transcript*)

Perlawanan terbuka (public transcript) adalah bentuk perlawanan yang dapat diamati, konkret dan secara langsung terdapat komunikasi antara dua pihak yang berselisih. perlawanan terbuka merupakan bentuk perlawanan yang ditandai dengan kemunculan tindakan yang bersumber dari komunikasi secara langsung antara kelas atas (kaum penguasa) dengan kelas bawah (kaum lemah). Contoh dari perlawanan terbuka adalah pemberontakan yang bersifat umum seperti demonstrasi. Perlawanan terbuka mengarah pada pergerakan yang dilakukan secara sistematis dengan koordinasi antara pemimpin dengan anggota yang berperan serta melakukan perlawanan.

2. Resistensi tertutup (*Hidden transcript*)

Perlawanan tertutup (hidden transcript) adalah bentuk perlawanan yang dilakukan oleh seseorang melalui prosedur yang kurang sistematis. Perlawanan tertutup cenderung mengacu pada gerakan penolakan secara perlahan dengan memperhitungkan bentuk perlawanan, capaian yang diperoleh dan penentuan sikap individu dalam mengorganisasi keinginan serta kemampuan untuk melakukan perlawanan.

Kedua jenis perlawanan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat menjadikan perlawanan sebagai alat untuk membantu kaum tertindas dalam mempertahankan kebudayaan dan sistem yang sudah ada. Perlawanan terbuka menunjukkan eksistensi perjuangan perlawanan yang diakui oleh masyarakat

karena bentuk tindakannya dapat diamati, sedangkan perlawanan tertutup cenderung tidak ada perwujudan secara nyata dalam kemunculan tindakan karena bersifat individual dan dianggap dapat berpengaruh pada tatanan yang sudah ada dalam diri seseorang.

Problematika yang terjadi pada nelayan Desa Weru, Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan tidak serta merta terjadi begitu saja, hal ini dipengaruhi oleh konflik vertical atas terbitnya regulasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait larangan menggunakan alat tangkap cantrang yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 2/Permen-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Perlawanan yang terjadi oleh nelayan Desa Weru dipengaruhi oleh berbagai faktor yang meliputi ; Sosial Budaya, Dasar Agama, Produktivitas Ekonomis, Keseimbangan Ekologis serta berbagai macam keresahan nelayan setempat terkait regulasi tersebut dikarenakan perspektif masyarakat yang digunakan sebagai idealis sehari-hari. Berbagai proses yang sudah dilakukan oleh nelayan Desa Weru dengan fasilitator yakni Rukun Nelayan (RN), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) serta lembaga masyarakat yang turut andil dalam upaya penolakan dan pencabutan regulasi yang dilakukan dalam upaya resistensi dan perlawanan secara bawah tanah, hal ini dikarenakan tidak selaras dan sepahaman antara pihak pemerintah dengan masyarakat sekitar yang berprofesi sebagai nelayan guna memenuhi insting dan naluria sebagai manusia dalam mencukupi kebutuhan hidup.